

SEKAPUR SIRIH

Para peserta Rakornis Bidang Perhubungan Darat yang saya hormati,
Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh, Salam sejahtera bagi kita semua,
Perkenankan saya mengajak Saudara-saudara sekalian untuk memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat kembali bertemu untuk mengikuti jalannya rapat koordinasi teknis bidang Perhubungan Darat yang diselenggarakan di Hotel Shangri-La, Surabaya, pada tanggal 4-6 Nopember 2008.

Meskipun Idul Fitri telah berlalu, izinkan saya pada kesempatan ini menghaturkan “Selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin”, bagi Saudara-saudara yang merayakan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan ridhonya serta menerima amal ibadah puasa yang telah kita jalani selama satu bulan penuh, di bulan Ramadhan yang baru lalu, amin.

Sungguh merupakan kebahagiaan bagi saya, karena Rapat Koordinasi Teknis bidang Perhubungan Darat Tahun 2008 kali ini, merupakan kali pertama bagi saya selaku Direktur Jenderal Perhubungan Darat bertatap muka dengan Saudara-saudara para Kepala Dinas Perhubungan Seluruh Indonesia. Saya selalu mengharapkan agar diantara kita dapat terbangun jalinan tali silaturahmi yang kokoh, karena saya yakin dengan semangat kebersamaan diantara kita, sebesar apapun tantangan serta hambatan yang akan kita hadapi dalam membangun transportasi di tanah air, Insya Allah akan dapat kita atasi secara bersama-sama.

Komunikasi yang berkesinambungan diantara kita harus terus kita bangun, kita harus terus mengobarkan semangat kebersamaan, kita harus dapat menyingkirkan ego kedaerahan dalam menciptakan iklim transportasi yang makin baik.

Akhirnya, saya ucapkan selamat bekerja, semoga melalui penyelenggaraan rapat koordinasi teknis kali ini, dapat kita wujudkan penyelenggaraan transportasi darat yang semakin baik, terintegrasi, dan dapat memenuhi harapan masyarakat luas. Dan semoga pula apa yang telah kita upayakan mendapat ridho dari Allah SWT. Amin.

Selamat bekerja.

Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

PENGANTAR

Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Panitia Pelaksana dapat menerbitkan buku panduan Pelaksanaan Rapat Koordinasi Teknis (RAKORNIS) Bidang Perhubungan Darat tahun 2008.

Buku panduan ini dibuat sebagai pedoman bagi para peserta dalam mengikuti RAKORNIS Bidang Perhubungan Darat seluruh Indonesia tahun 2008, yang berisi antara lain : organisasi persidangan, jadwal acara, tata tertib dan daftar peserta.

RAKORNIS Bidang Perhubungan Darat ini diselenggarakan dari tanggal 4 s.d 6 Nopember 2008 di Hotel Shangri-La Surabaya, dengan harapan semoga RAKORNIS ini dapat terselenggara dengan lancar serta bermanfaat bagi para peserta dan masyarakat pada umumnya.

Pada kesempatan ini Panitia Pelaksana mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi - tingginya kepada pihak-pihak yang telah ikut berperan serta sejak dari tahap persiapan sampai dengan pelaksanaan Rakornis ini.

Selanjutnya tak lupa pula Panitia Pelaksana menyampaikan permohonan maaf sekiranya dalam penyelenggaraan Rakornis ini terdapat kekurangan-kekurangan pada sesi-sesi kegiatan tertentu.

Demikian disampaikan dan Selamat mengikuti Rakornis.

Surabaya, 4 Nopember 2008

**PANITIA
RAKORNIS BIDANG PERHUBUNGAN DARAT TAHUN 2008**

TTD

KETUA PANITIA

A. LATAR BELAKANG

Otonomi daerah yang diberlakukan sejak tahun 1999 dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah telah membawa perubahan-perubahan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam hal tata kelola pemerintahan, yakni dari pola sentralisasi menjadi desentralisasi. Secara teoritis kondisi ini akan berdampak positif terhadap peningkatan peran daerah dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan di daerah-daerah, karena peran pusat telah bergeser lebih ke fasilitator dan supervisor.

Namun demikian, pada kenyataannya penguatan peran dimaksud tidak atau belum diiringi dengan kesiapan sejumlah prasyarat agar otonomi daerah dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai tujuannya, yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan demokratisasi. Beberapa prasyarat seperti kesiapan sumber daya manusia, kelembagaan, peraturan perundang-undangan dan jaringan prasarana atau infrastruktur sebagian besar dalam kondisi tidak atau kurang memadai, sehingga selama beberapa waktu masyarakat harus membayar lebih mahal (*social cost*) dibanding periode sebelum otonomi daerah diberlakukan untuk mendapatkan layanan umum. Memperhatikan beberapa permasalahan dan kendala tersebut diatas kemudian dilakukan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, yaitu dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang ditindaklanjuti dengan penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Perubahan-perubahan dimaksud antara lain dengan diterapkannya kriteria eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan pembagian urusan pemerintahan.

Dalam konteks penyelenggaraan Transportasi Darat, sejumlah permasalahan dan kendala masih ditemui seperti kebijakan penarikan retribusi terhadap angkutan antar kota dan barang setiap melintas pada wilayah administratif tertentu, lemahnya pengawasan dan pengendalian terhadap muatan lebih, kurangnya komitmen dan aksi bersama terhadap keselamatan jalan, kurangnya pengawasan kelaikan sarana angkutan jalan, serta terbatasnya kualitas sumber daya manusia bidang transportasi darat. Dengan melalui forum rapat koordinasi teknis bidang perhubungan darat tersebut, akan dibahas permasalahan-permasalahan dan kendala yang masih terjadi dalam penyelenggaraan transportasi darat untuk dapat dicarikan solusinya, serta adanya tukar menukar

informasi mengenai model-model penanganan permasalahan penyelenggaraan transportasi darat untuk tingkat nasional, regional dan daerah.

Keberhasilan model-model penanganan permasalahan yang sesuai dengan karakteristik wilayah dapat memberikan inovasi sekaligus inspirasi dalam penyelenggaraan transportasi darat di wilayah yang lainnya. Dengan demikian, melalui Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Bidang Perhubungan Darat ini diharapkan dapat dirumuskan langkah-langkah tindak lanjut guna mewujudkan layanan transportasi darat yang aman, selamat, mudah dijangkau, berdaya saing dan terintegrasi.

B. MAKSUD TUJUAN

Secara umum maksud dan tujuan penyelenggaraan Rakornis adalah dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan transportasi darat melalui pembinaan teknis secara berkesinambungan terhadap para pejabat yang melaksanakan tugas-tugas operasional di lapangan, khususnya dalam rangka :

1. Mendapatkan masukan dari pemerintah daerah tentang hal - hal yang terkait dengan kebijakan pemerintah pusat pada sub sektor transportasi darat.
2. Menemukanali permasalahan-permasalahan di lapangan dan merumuskan langkah tindak lanjut pemecahannya.

C. TEMA

Tema dalam Rakornis tahun 2008 ini berkaitan dengan pokok bahasan yang akan didiskusikan perihal tantangan penyelenggaraan transportasi masa depan berkaitan dengan inovasi model-model pemecahan permasalahan penyelenggaraan transportasi serta *issue-issue* strategis lainnya. Terkait hal tersebut tema yang dicanangkan adalah :

“Inovasi Penyelenggaraan Transportasi Darat Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan dan Keselamatan Pemakai Jasa”

D. PENYELENGGARAAN RAKORNIS

1. Waktu dan Tempat

Rakornis dilaksanakan pada tanggal 4 s.d 6 Nopember 2008 bertempat di Hotel Shangri-La, Jalan Mayjen Sungkono No. 120 Surabaya, Jawa Timur. Telp. (031) 566 15 50, Fax. (031) 566 15 70.

2. Fasilitas yang disediakan :

- a. Akomodasi bagi peserta;
- b. Fasilitas ruang Sidang;
- c. Perlengkapan untuk peserta berupa tas berisi bahan presentasi dan alat tulis;
- d. Konsumsi selama Rakornis;
- e. Pelayanan kesehatan ringan;

3. Fasilitas yang tidak ditanggung Panitia :

- a. Biaya penggunaan fax atau telepon;
- b. Permintaan akomodasi, konsumsi dan lain-lain diluar yang telah disediakan Panitia;
- c. Mini Bar, Permintaan Laundry dan fasilitas lain yang tidak termasuk pelayanan hotel;
- d. Kehilangan barang milik hotel (Handuk, Selimut, Bed Cover, Kunci Kamar, Teko dll);

4. Pendaftaran Peserta

Para peserta Rakornis sudah harus melapor kepada panitia :

Hari / Tanggal : Selasa, 4 Nopember 2008

Pukul : 13.00-18.00 WIB

Tempat : Hotel SHANGRI-LA

Jl. Mayjen Sungkono No. 120, Surabaya 60256

Telp. (031) 566 15 50

Fax. (031) 566 15 70

5. Pembicara

Pembicara yang akan mengisi acara Rakornis adalah :

- a. Menteri Perhubungan R.I
- b. Direktur Jenderal Perhubungan Darat
- c. Inspektur Jenderal Departemen Perhubungan
- d. Firmantoko, Motivator
- e. Anggota Komisi V DPR RI

- f. Dirjen Bina Marga, Departemen Pekerjaan Umum
- g. Kepala Dinas Perhubungan Propinsi D.K.I. Jakarta
- h. Kepala Dinas Perhubungan Propinsi D.I. Yogyakarta
- i. Kepala Dinas LLAJ Propinsi Jawa Timur
- j. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam
- k. Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Kalimantan Tengah
- l. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Ditjen Hubdat
- m. Direktur Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (LLASDP) Ditjen Hubdat
- n. Direktur Bina Sistem Transportasi Perkotaan (BSTP) Ditjen Hubdat
- o. Direktur Keselamatan Transportasi Darat (KTD) Ditjen Hubdat

6. **Peserta Rakornis**

Peserta Rakornis terdiri dari unsur-unsur:

- a. Ditjen Perhubungan Darat;
- b. Kepala Dinas Perhubungan/LLAJ Propinsi;
- c. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota;
- d. BUMN Bidang Perhubungan Darat;
- e. Kepala Puslitbang Bidang Perhubunga Darat;
- f. Ketua STTD;
- g. Kepala UPT di lingkungan Ditjen Hubdat;
- h. Kepala Pusdiklat Perhubungan Darat;
- i. Kepala Balai Transjaya Tegal;
- j. Kepala Balai Diklat Phb. Darat Bali;
- k. Kepala Balai Diklat LLASDP Palembang;
- l. Unit Kerja terkait di lingkungan Dephub.

E. ACARA

Secara garis besar acara yang akan dilaksanakan meliputi:

- 1. Pembukaan dan Pengarahan oleh Menteri Perhubungan.
- 2. Pengarahan Umum oleh Dirjen Hubdat.
- 3. Presentasi/Ceramah Inspektur Jenderal Departemen Perhubungan dengan topik :
“Kebijakan Pengurusan dalam Pelaksanaan Tugas Perencanaan dan Pembangunan”.
- 4. Ceramah Motivasi oleh Firmantoko.
- 5. Pemaparan Anggota Komisi V DPR RI.

6. Pemaparan Dirjen Bina Marga, Departemen Pekerjaan Umum.
7. Pemaparan Perwakilan Daerah :
 - a. Kepala Dinas Perhubungan Propinsi DKI Jakarta, dengan topik :
"Penerapan Busway di DKI Jakarta "
 - b. Kepala Dinas Perhubungan Propinsi DI Yogyakarta, dengan topik :
"Penerapan Trans Jogja di kota Yogyakarta"
 - c. Kepala Dinas LLAJ Propinsi Jawa Timur, dengan topik :
"Penerapan ISO Pelayanan Bidang LLAJ di Pronpinsi Jatim"
 - d. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dengan topik :
"Penerapan Catatan Pelanggaran Bidang LLAJ"
 - e. Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Kalimantan Tengah, dengan topik :
"Penerapan Transportasi Angkutan Sungai di Propinsi Kalteng"
8. Presentasi Direktur LLAJ Ditjen Hubdat, Direktur LLASDP Ditjen Hubdat, Direktur BSTP Ditjen Hubdat dan Direktur KTD Ditjen Hubdat.
9. Penutupan.

Susunan Acara Rakornis Bidang Perhubungan Darat sebagaimana dalam lampiran I.

F. TATA TERTIB PENYELENGGARAAN RAKORNIS

1. Panitia Pelaksana menerima pendaftaran peserta mulai pukul 13.00 WIB pada Hari Selasa tanggal 4 November 2008.
2. Peserta menginap di Hotel Shangri-La, Surabaya, Jawa Timur.
3. Hadir 15 menit di ruang sidang sebelum acara dimulai.
4. Mengisi daftar hadir yang disediakan Panitia.
5. Peserta Wajib Berpakaian Dinas Harian lengkap dan menggunakan tanda pengenal yang disediakan Panitia selama kegiatan dan berpakaian batik pada acara pembukaan.
6. Selama kegiatan berlangsung, peserta dilarang meninggalkan ruang Rakornis atau sidang kecuali mendapat ijin dari Panitia.
7. Menjaga kebersihan lingkungan dan tidak merokok di ruang Rakornis atau ruang sidang.
8. Memberitahukan kepada Panitia apabila berhalangan hadir.
9. Menjaga ketertiban dan ketenangan selama Rakornis berlangsung.

G. JUMLAH PESERTA DAN UNDANGAN RAKORNIS TAHUN 2008

1. PESERTA

Jumlah peserta dalam penyelenggaraan Rakornis tahun 2008 direncanakan sebanyak 558 orang, yang terdiri dari:

- a. Dirjen Perhubungan Darat = 1 orang
- b. Sesditjen / Para Direktur di lingkungan
Ditjen Perhubungan Darat = 5 orang
- c. Kapuslitbang Bidang Perhubungan Darat = 1 orang
- d. Kapusdiklat Perhubungan Darat = 1 orang
- e. Kepala Pusat Kajian Strategis PJP Dephub = 1 orang
- f. Kepala Dishub/LLAJ Propinsi = 33 orang
- g. Kepala Dinas Perhubungan Kota = 96 orang
- h. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten = 387 orang
- i. Direksi BUMN (Damri, ASDP) = 4 orang
- j. Kepala Balai di lingkungan Ditjen Hubdat = 3 orang
- k. Ketua STTD Bekasi = 1 orang
- l. Kepala UPT di lingk Ditjen Hubdat = 4 orang
- m. Pemimpin Cabang PT. ASDP = 12 orang
- n. Para Pejabat Eselon III di lingkungan
Ditjen Perhubungan Darat = 10 orang

2. UNDANGAN

Peserta undangan yang diharapkan hadir dalam Rakornis Tahun 2008 ini terdiri dari Unit Kerja / Instansi di lingkungan Departemen Perhubungan dan Instansi terkait yang mempunyai relevansi langsung dalam upaya peningkatan kinerja keselamatan dalam penyelenggaraan transportasi darat.

Undangan terdiri dari:

- a. Menteri Perhubungan = 1 orang
- b. Sekjen Departemen Perhubungan = 1 orang
- c. Gubernur Jawa Timur = 1 orang
- d. Irjen Departemen Perhubungan = 1 orang
- e. Dirjen Perhubungan Laut = 1 orang
- f. Dirjen Perhubungan Udara = 1 orang
- g. Kabadan Litbang Dephub = 1 orang
- h. Kabadan Diklat Dephub = 1 orang
- i. Direksi BUMN Bidang Perhubungan Darat = 2 orang
- j. Kepala Biro Perencanaan Dephub = 1 orang

k. Kepala Biro Keuangan Dephub	=	1 orang
l. Kepala Pusdatin Dephub	=	1 orang
m. Direktur Transportasi Bappenas	=	1 orang
n. DPP Organda	=	1 orang
o. Gapasdap	=	1 orang
p. PT. Jasa Raharja	=	1 orang
q. PT. Jasa Raharja Putera	=	1 orang
r. Wartawan	=	10 orang

LAMPIRAN - LAMPIRAN

SUSUNAN ACARA
RAKORNIS BIDANG PERHUBUNGAN DARAT
TANGGAL 4 s.d 6 NOPEMBER 2008
HOTEL SHANGRI-LA SURABAYA

NO	HARI / TGL	JAM	KEGIATAN / ACARA	TEMPAT	PENANGGUNG JAWAB
		WIB			
1.	Selasa 4 Nop '08	13.00-18.00	Registrasi Peserta	Lobby Hotel Shangri-La Surabaya	Bidang Akomodasi
		19.00 – selesai	Pembukaan Rakornis Lagu Indonesia Raya Laporan Ketua Panitia Sambutan Selamat Datang oleh Gubernur Jawa Timur Pengarahan dan Pembukaan Rakornis oleh Menteri Perhubungan Pembacaan Doa Peninjauan Pameran Ramah tamah, Makan malam dan Hiburan	<i>Pakaian Batik Lengan Panjang</i>	Bidang Acara, Humas, MC

NO	HARI / TGL	JAM	KEGIATAN / ACARA	TEMPAT	PENANGGUNG JAWAB
		WIB			
2.	Rabu 5 Nop'08	06.00-07.30	Makan Pagi	Ruang Jambo Restaurant (Lantai 1)	Bidang Komsumsi
		07.30-09.00	Hymne Perhubungan Pengarahan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Dilanjutkan dengan Tanya Jawab Moderator : Sekretaris Ditjen Hubdat	Ruang Shangri-La Ballroom <i>Pakaian Dinas Harian</i>	Bidang Acara, Sekretariat, Materi
		09.00-09.45	Presentasi/Ceramah Inspektur Jenderal Dephub "Kebijakan Pengurusan dalam Pelaksanaan Tugas Perencanaan dan Pembangunan" Dilanjutkan dengan Tanya Jawab Moderator : Sekretaris Ditjen Hubdat	Ruang Shangri-La Ballroom	Bidang Acara, Sekretariat, Materi
		09.45-11.15	Ceramah Motivasi oleh Bapak Firmantoko Moderator : Direktur LLASDP	Ruang Shangri-La Ballroom	Bidang Acara, Sekretariat, Materi
		11.15-12.00	Paparan Anggota Komisi V DPR-RI Moderator : Sekretaris Ditjen Hubdat	Ruang Shangri-La Ballroom	Bidang Acara, Sekretariat, Materi
		12.00-12.45	Paparan Direktur Jenderal Bina Marga Departemen PU "Keberadaan Jaringan Jalan Mendukung Fungsi Penyelenggaraan Transportasi Darat" Moderator : Kapusdiklat Perhubungan Darat	Ruang Shangri-La Ballroom	Bidang Acara, Sekretariat, Materi
		12.45-14.00	ISHOMA (Organ Tunggal dan Penyanyi)	Ruang Shangri-La Ballroom Hall A	Bidang Konsumsi

NO	HARI / TGL	JAM	KEGIATAN / ACARA	TEMPAT	PENANGGUNG JAWAB
		WIB			
		14.00-16.00	Pemaparan : 1. Paparan Kadishub Prop. DKI Jakarta “Penerapan Busway di DKI Jakarta” 2. Paparan Kadishub Prop. DI Yogyakarta “Penerapan Trans Yogja di kota Yogyakarta” 3. Paparan Kadis LLAJ Prop. Jawa Timur “Penerapan ISO Pelayanan Bidang LLAJ di Propinsi Jawa Timur” 4. Paparan Kadishub Komunikasi, Informasi dan Telematika Prop. NAD “Penerapan Catatan Pelanggaran Bidang LLAJ” 5. Paparan Kadishub Prop. Kalimantan Tengah “Penerapan Transportasi Angkutan Sungai di Propinsi Kalimantan Tengah” Moderator : Direktur KTD	Ruang Shangri-La Ballroom	Bidang Acara, Sekretariat, Materi
		16.00-16.15	Rehat / Sholat		
		16.15-17.30	Diskusi Panel : 1. Presentasi dari Direktur LLAJ 2. Presentasi dari Direktur LLASDP 3. Presentasi dari Direktur BSTP 4. Presentasi dari Direktur KTD Dilanjutkan dengan Tanya Jawab Moderator : Kepala Dinas Perhubungan Prop. Jawa Timur	Ruang Shangri-La Ballroom	Bidang Acara, Sekretariat, Materi
		17.30-19.00	Perumusan Hasil Rakornis oleh Tim Perumus	Ruang Shangri-La Ballroom	Bidang Acara, Sekretariat, Materi dan Konsumsi

NO	HARI / TGL	JAM	KEGIATAN / ACARA	TEMPAT	PENANGGUNG JAWAB
		WIB			
3.	Kamis, 6 Nop'08	06.00-08.00	Makan Pagi	Ruang Jambo Restaurant (Lantai 1)	Bidang Konsumsi
		08.00-09.00	Penutupan Rakornis Pembacaan Perumusan Hasil Rakornis Bidang Perhubungan Darat oleh Sesditjen Hubdat dilanjutkan penyerahan hasil perumusan kepada Dirjen Hubdat Laporan Ketua Panitia Kesan dan Pesan Peserta Penutupan oleh Dirjen Hubdat Pembacaan Doa Ramah Tamah	Ruang Shangri-La Ballroom <i>Pakaian Dinas Harian</i>	Bidang Acara, Sekretariat, Materi
		09.00-11.00	Pembagian Hasil Proceeding Rakornis	Ruang Shangri-La Ballroom	Bidang Acara, Sekretariat, Materi
		11.00-12.00	Makan Siang		Bidang Konsumsi
		13.00	Check Out		

TIM PERUMUS HASIL RAKORNIS BIDANG PERHUBUNGAN DARAT

- Ketua : Ir. Hotma P. Simanjuntak, MSTR
- WK. Ketua : Perwakilan Daerah
- Sekretaris : Ir. Djamal Subastian, M.Sc
- Anggota :
 - a. Perwakilan dari Prop. Nanggroe Aceh Darussalam
 - b. Perwakilan dari Prop. Lampung
 - c. Perwakilan dari Prop. DKI Jakarta
 - d. Perwakilan dari Prop. D.I. Yogyakarta
 - e. Perwakilan dari Prop. Jawa Timur
 - f. Perwakilan dari Prop. Kalimantan Tengah
 - g. Perwakilan dari Prop. Sulawesi Utara
 - h. Perwakilan dari Prop. Nusa Tenggara Timur
 - i. Perwakilan dari Prop. Maluku
 - j. Perwakilan dari Prop. Papua
 - k. Ir. Jhonny Siagian, MM
 - l. Gede Pasek Suardika, M.Sc
 - m. Ir. Sugihardjo, M.Si
 - n. Pandu Yunianto, M.Eng.Sc
 - o. Ir. Tri Yuli Andaru, MSi
 - p. Drs. Firdaus Rasyad, MM
 - q. Ir. Rasman Ginting, MSTR
 - r. Ir. Cucu Mulyana, DESS
 - s. Purwatiningsih, SH, MM

- Kesekretariatan :
 - a. Ahmadi, ATD, MM
 - b. Ir. Fadli Arif, DESS
 - c. Rudi Irawan, S.SiT, MT
 - d. Ahmad Yani, ATD, MT
 - e. Suyadi, SH
 - f. Nurhadi Unggul Wibowo, ST, MT
 - g. Hestiyanto Prabowo, S.SiT, MT
 - h. Kiki Asriyanto, A.Md.LLAJ
 - i. Mario Palamai, A.Md.LLAJ

MODERATOR DAN NOTULEN

PENGARAHAN UMUM

- ◆ Pembicara : Direktur Jenderal Perhubungan Darat
- ◆ Moderator : Sekretaris Ditjen Perhubungan Darat
- ◆ Notulen : 1. Ahmadi, ATD, MM
2. Nurhadi Unggul Wibowo, ST, MT

PRESENTASI 1 (Ceramah Kebijakan Pengurusan dalam Pelaksanaan Tugas Perencanaan dan Pembangunan)

- ◆ Pembicara : Inspektur Jenderal Departemen Perhubungan
- ◆ Moderator : Sekretaris Ditjen Perhubungan Darat
- ◆ Notulen : 1. Ir. Fadli Arif, DESS
2. Hestiyanto Prabowo, S.SiT, MT

PRESENTASI 2 (Ceramah Motivasi Bidang Perhubungan Darat)

- ◆ Pembicara : Firmantoko
- ◆ Moderator : Direktur Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (LLASDP)
- ◆ Notulen : 1. Rudi Irawan, S.SiT, MT
2. Kiky Asriyanto, A.Md.LLAJ

PRESENTASI 3 (Ceramah Anggota Komisi V DPR-RI)

- ◆ Pembicara : Anggota Komisi V DPR-RI
- ◆ Moderator : Sekretaris Ditjen Perhubungan Darat
- ◆ Notulen : 1. Ahmad Yani, ATD, MT
2. Mario Palamai, Amd. LLAJ

PRESENTASI 4 (Ceramah Keberadaan Jaringan Jalan Mendukung Fungsi Penyelenggaraan Transportasi Darat)

- ◆ Pembicara : Direktur Jenderal Bina Marga, Departemen PU
- ◆ Moderator : Kapusdiklat Perhubungan Darat
- ◆ Notulen : 1. Suyadi, SH
2. Hestiyanto Prabowo, S.SiT, MT

PRESENTASI 5 (Panelis para Kepala Dinas Perhubungan)

- ◆ Pembicara : 1. Kepala Dinas Perhubungan Propinsi DKI Jakarta
2. Kepala Dinas Perhubungan Propinsi DI Yogyakarta
3. Kepala Dinas LLAJ Propinsi Jawa Timur
4. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam
5. Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Kalimantan Tengah
- ◆ Moderator : Direktur Keselamatan Transportasi Darat (KTD)
- ◆ Notulen : 1. Ahmadi, ATD, MM
2. Mario Palamai, Amd. LLAJ

PRESENTASI 6 (Panelis para Direktur di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat)

- ◆ Pembicara :
 1. Direktur LLAJ
 2. Direktur LLASDP
 3. Direktur BSTP
 4. Direktur KTD
- ◆ Moderator : Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Jawa Timur
- ◆ Notulen :
 1. Ir. Fadli Arif, DESS
 2. Nurhadi Unggul Wibowo, ST, MT

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
PANITIA PENYELENGGARA RAPAT KOORDINASI TEKNIS (RAKORNIS)
BIDANG PERHUBUNGAN DARAT
SELURUH INDONESIA TAHUN 2008
NO. : SK.2451/KP.801/DRJD/2008**

I. PENGARAH

- 1. Ketua : Dirjen Perhubungan Darat
- Anggota : a. Sekretaris Ditjen Hubdat;
b. Direktur LLAJ;
c. Direktur LLASDP;
d. Direktur BSTP;
e. Direktur KTD;
f. Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Jawa Timur;
g. Kepala Dinas LLAJ Propinsi Jawa Timur;
h. Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya.

II. PANITIA PELAKSANA/PENANGGUNG JAWAB :

- 1. Ketua :
- 2. WK. Ketua : Drs. Wijianto, MSi
- 3. Sekretaris : Sugianto, ATD, MM
- 4. Bendahara : Zainal Arifin, SE

A. PANITIA PELAKSANA BIDANG MATERI, PERSIDANGAN DAN NOTULEN

- 1. Ketua : Ir. Hotma P. Simanjuntak, MStr
- WK. Ketua 1 : Ir. Jamal Subastian, MSc
- WK. Ketua 2 : Ir. Jhonny Siagian, MM
- WK. Ketua 3 : Gede Pasek Suardika, MSc
- 2. Sekretaris : I Made Suartika, MSc
- 3. Anggota : a. Ir. Sugiharjo, MSi
b. Pandu Yuniyanto, MEng.Sc
c. Ir. Tri Yuli Andaru, MSi
d. Drs. Firdaus Rasyad, MM
e. Ir. Rasman Ginting, MStr
f. Ir. Cucu Mulyana, DESS
g. Purwatiningsih, SH, MM
h. Ahmadi ATD, MM
i. Ir. Fadli Arif, DESS
j. Rudi Irawan, SSiT, MT
k. Ahmad Yani, ATD, MT
l. Suyadi, SH
m. Kiki Asriyanto, Amd.LLAJ
n. Nurhadi Unggul Wibowo, ST, MT
o. Mario Palamai, Amd. LLAJ
p. Imam Supriyadi, SE
q. Hestiyanto Prabowo, SSiT, MT

B. PANITIA PELAKSANA BIDANG ACARA

1. Ketua : R.H. Christiono, MSc
2. Wakil Ketua : Dra. Sari Catur Lestari
3. Anggota : a. Dwi Siwi S.
b. Astri Widiani, Amd.LLAJ, SE
c. Ajeng Herdinawati, S.PSi
d. Hadi Setiabudi P, SSiT

D. PANITIA PELAKSANA BIDANG TRANSPORTASI

1. Ketua : Eddy Gunawan, ATD, MEng.Sc
2. Wakil Ketua : Drs. Subroto
3. Anggota : a. Kusnanto Hadi, SE
b. Robin Maulana
c. Wahyu Hapsoro
d. Sumarsono, ATD, MSi (Dinas LLAJ Jawa Timur)
e. Hartono, SE, MSc (Dinas LLAJ Jawa Timur)
f. Bambang Sukarno, Amd.LLAJ, MMT (Dinas LLAJ Jatim)
g. M. Isa Anshori, ATD (Dishub Propinsi Jawa Timur)
h. Hisqhil (Dinas LLAJ Jawa Timur)
i. Rofiq (Dinas LLAJ Jawa Timur)

E. PANITIA PELAKSANA BIDANG PERJALANAN

1. Ketua : Hari Putranto, SE, MT
2. Wakil Ketua : Yosep Yanuar, Amd.LLAJ
3. Anggota : a. Ihwan Prihanto, SsiT
b. Tedi Kusno Witoro

F. PANITIA PELAKSANA BIDANG AKOMODASI DAN KONSUMSI

1. Ketua : Sigit Irfansyah, MSc
2. Wakil Ketua : Esron Sinaga, SE
3. Anggota : a. Ir. Jujun Endah Wahyuningrum, MStr
b. Aryandi Arius, SSiT
c. Hardiyanto
d. Mulia PAS
e. Avi Mukti Amin, SSiT, MT
f. Hendra Ayi Sonica, SE
g. Ayu Nilawati, SE
h. Sari Dewi P, SE

G. PANITIA PELAKSANA BIDANG SEKRETARIAT DAN PROCEEDING

1. Ketua : Zaenal Arifin, SE
2. Wakil Ketua : Ni Widaningsih, SE
3. Anggota : a. Sri Hardiyanto, ST
b. Tofan Muis, SE, MM
c. Hery Darmanto, Amd.MI
d. Asep Suhendar
e. Christanto
f. Thomas Brima
g. Saryana
h. Yustina Diah N, Amd.Keper (Paramedis)

H. PANITIA PELAKSANA BIDANG HUMAS DAN PELIPUTAN

1. Ketua : Drs. Djoko Soelaksono
2. Sekretaris : Puri Artyanti R, Amd.TK
3. Anggota : Arif Pintoko

Jakarta, 2 September 2008

TTD

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

**PESERTA RAPAT KOORDINASI TEKNIS (RAKORNIS)
 BIDANG PERHUBUNGAN DARAT
 SELURUH INDONESIA TAHUN 2008**

1.	Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika Prop. Nanggroe Aceh Darussalam			
2.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Aceh Barat	Prop.	Nanggroe Aceh Darussalam
3.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Aceh Barat Daya	Prop.	Nanggroe Aceh Darussalam
4.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Aceh Besar	Prop.	Nanggroe Aceh Darussalam
5.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Aceh Jaya	Prop.	Nanggroe Aceh Darussalam
6.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Aceh Selatan	Prop.	Nanggroe Aceh Darussalam
7.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Aceh Singkil	Prop.	Nanggroe Aceh Darussalam
8.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Aceh Tamiang	Prop.	Nanggroe Aceh Darussalam
9.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Aceh Tengah	Prop.	Nanggroe Aceh Darussalam
10.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Aceh Tenggara	Prop.	Nanggroe Aceh Darussalam
11.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Aceh Timur	Prop.	Nanggroe Aceh Darussalam
12.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Aceh Utara	Prop.	Nanggroe Aceh Darussalam
13.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Bener Meriah	Prop.	Nanggroe Aceh Darussalam
14.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Bireuen	Prop.	Nanggroe Aceh Darussalam
15.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Gayo Lues	Prop.	Nanggroe Aceh Darussalam
16.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Nagan Raya	Prop.	Nanggroe Aceh Darussalam
17.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Pidie	Prop.	Nanggroe Aceh Darussalam
18.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Pidie Jaya	Prop.	Nanggroe Aceh Darussalam
19.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Simeulue	Prop.	Nanggroe Aceh Darussalam
20.	Kepala Dinas Perhubungan	Kota Banda Aceh	Prop.	Nanggroe Aceh Darussalam
21.	Kepala Dinas Perhubungan	Kota Langsa	Prop.	Nanggroe Aceh Darussalam
22.	Kepala Dinas Perhubungan	Kota Lhokseumawe	Prop.	Nanggroe Aceh Darussalam
23.	Kepala Dinas Perhubungan	Kota Sabang	Prop.	Nanggroe Aceh Darussalam
24.	Kepala Dinas Perhubungan	Kota Subulussalam	Prop.	Nanggroe Aceh Darussalam
25.	Kepala Dinas Perhubungan Prop. Sumatera Utara			
26.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Asahan	Prop.	Sumatera Utara
27.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Batu Bara	Prop.	Sumatera Utara
28.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Dairi	Prop.	Sumatera Utara
29.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Deli Serdang	Prop.	Sumatera Utara
30.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Humbang Hasundutan	Prop.	Sumatera Utara
31.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Karo	Prop.	Sumatera Utara
32.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Labuhanbatu	Prop.	Sumatera Utara
33.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Labuhanbatu Selatan	Prop.	Sumatera Utara
34.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Labuhanbatu Utara	Prop.	Sumatera Utara
35.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Langkat	Prop.	Sumatera Utara
36.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Mandailing Natal	Prop.	Sumatera Utara
37.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Nias	Prop.	Sumatera Utara
38.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Nias Selatan	Prop.	Sumatera Utara
39.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Padang Lawas	Prop.	Sumatera Utara
40.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Padang Lawas Utara	Prop.	Sumatera Utara
41.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Pakpak Bharat	Prop.	Sumatera Utara
42.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Samosir	Prop.	Sumatera Utara
43.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Serdang Bedagai	Prop.	Sumatera Utara
44.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Simalungun	Prop.	Sumatera Utara
45.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Tapanuli Selatan	Prop.	Sumatera Utara
46.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Tapanuli Tengah	Prop.	Sumatera Utara
47.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Tapanuli Utara	Prop.	Sumatera Utara
48.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Toba Samosir	Prop.	Sumatera Utara
49.	Kepala Dinas Perhubungan	Kota Binjai	Prop.	Sumatera Utara
50.	Kepala Dinas Perhubungan	Kota Medan	Prop.	Sumatera Utara
51.	Kepala Dinas Perhubungan	Kota Padang Sidempuan	Prop.	Sumatera Utara
52.	Kepala Dinas Perhubungan	Kota Pematangsiantar	Prop.	Sumatera Utara
53.	Kepala Dinas Perhubungan	Kota Sibolga	Prop.	Sumatera Utara
54.	Kepala Dinas Perhubungan	Kota Tanjung Balai	Prop.	Sumatera Utara
55.	Kepala Dinas Perhubungan	Kota Tebing Tinggi	Prop.	Sumatera Utara
56.	Kepala Dinas Perhubungan Prop. Bengkulu			
57.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Bengkulu Selatan	Prop.	Bengkulu
58.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Bengkulu Tengah	Prop.	Bengkulu
59.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Bengkulu Utara	Prop.	Bengkulu

60.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Kaur	Prop.	Bengkulu
61.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Kepahiang	Prop.	Bengkulu
62.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Lebong	Prop.	Bengkulu
63.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Mukomuko	Prop.	Bengkulu
64.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Rejang Lebong	Prop.	Bengkulu
65.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Seluma	Prop.	Bengkulu
66.	Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Bengkulu	Prop.	Bengkulu
67.	Kepala Dinas Perhubungan	Prop.	Jambi		
68.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Kerinci	Prop.	Jambi
69.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Merangin	Prop.	Jambi
70.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Sarolangun	Prop.	Jambi
71.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Batang Hari	Prop.	Jambi
72.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Muaro Jambi	Prop.	Jambi
73.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Tanjung Jabung Barat	Prop.	Jambi
74.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Tanjung Jabung Timur	Prop.	Jambi
75.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Bungo	Prop.	Jambi
76.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Tebo	Prop.	Jambi
77.	Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Jambi	Prop.	Jambi
78.	Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Sungai Penuh	Prop.	Jambi
79.	Kepala Dinas Perhubungan	Prop.	Riau		
80.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Bengkalis	Prop.	Riau
81.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Indragiri Hilir	Prop.	Riau
82.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Indragiri Hulu	Prop.	Riau
83.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Kampar	Prop.	Riau
84.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Kuantan Singingi	Prop.	Riau
85.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Pelalawan	Prop.	Riau
86.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Rokan Hilir	Prop.	Riau
87.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Rokan Hulu	Prop.	Riau
88.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Siak	Prop.	Riau
89.	Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Pekanbaru	Prop.	Riau
90.	Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Dumai	Prop.	Riau
91.	Kepala Dinas Perhubungan	Prop.	Sumatera Barat		
92.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Agam	Prop.	Sumatera Barat
93.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Dharmasraya	Prop.	Sumatera Barat
94.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Kepulauan Mentawai	Prop.	Sumatera Barat
95.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Lima Puluh Kota	Prop.	Sumatera Barat
96.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Padang Pariaman	Prop.	Sumatera Barat
97.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Pasaman	Prop.	Sumatera Barat
98.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Pasaman Barat	Prop.	Sumatera Barat
99.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Pesisir Selatan	Prop.	Sumatera Barat
100.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Sijunjung	Prop.	Sumatera Barat
101.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Solok	Prop.	Sumatera Barat
102.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Solok Selatan	Prop.	Sumatera Barat
103.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Tanah Datar	Prop.	Sumatera Barat
104.	Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Bukittinggi	Prop.	Sumatera Barat
105.	Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Padang	Prop.	Sumatera Barat
106.	Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Padangpanjang	Prop.	Sumatera Barat
107.	Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Pariaman	Prop.	Sumatera Barat
108.	Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Payakumbuh	Prop.	Sumatera Barat
109.	Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Sawahlunto	Prop.	Sumatera Barat
110.	Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Solok	Prop.	Sumatera Barat
111.	Kepala Dinas Perhubungan	Prop.	Sumatera Selatan		
112.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Ogan Komering Ulu	Prop.	Sumatera Selatan
113.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Ogan Komering Ilir	Prop.	Sumatera Selatan
114.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Muara Enim	Prop.	Sumatera Selatan
115.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Lahat	Prop.	Sumatera Selatan
116.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Musi Rawas	Prop.	Sumatera Selatan
117.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Musi Banyuasin	Prop.	Sumatera Selatan
118.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Banyuasin	Prop.	Sumatera Selatan
119.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Ogan Komering Ulu Timur	Prop.	Sumatera Selatan
120.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Ogan Komering Ulu Selatan	Prop.	Sumatera Selatan
121.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Ogan Ilir	Prop.	Sumatera Selatan
122.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Empat Lawang	Prop.	Sumatera Selatan
123.	Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Palembang	Prop.	Sumatera Selatan
124.	Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Pagar Alam	Prop.	Sumatera Selatan
125.	Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Lubuklinggau	Prop.	Sumatera Selatan
126.	Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Prabumulih	Prop.	Sumatera Selatan
127.	Kepala Dinas Perhubungan	Prop.	Lampung		
128.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Lampung Selatan	Prop.	Lampung

129. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Lampung Tengah	Prop.	Lampung
130. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Lampung Utara	Prop.	Lampung
131. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Lampung Barat	Prop.	Lampung
132. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Tulang Bawang	Prop.	Lampung
133. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Tanggamus	Prop.	Lampung
134. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Lampung Timur	Prop.	Lampung
135. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Way Kanan	Prop.	Lampung
136. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Pesawaran	Prop.	Lampung
137. Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Bandar Lampung	Prop.	Lampung
138. Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Metro	Prop.	Lampung
139. Kepala Dinas Perhubungan	Prop.	Bangka Belitung		
140. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Bangka	Prop.	Bangka Belitung
141. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Belitung	Prop.	Bangka Belitung
142. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Bangka Selatan	Prop.	Bangka Belitung
143. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Bangka Tengah	Prop.	Bangka Belitung
144. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Bangka Barat	Prop.	Bangka Belitung
145. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Belitung Timur	Prop.	Bangka Belitung
146. Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Pangkal Pinang	Prop.	Bangka Belitung
147. Kepala Dinas Perhubungan	Prop.	Kepulauan Riau		
148. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Bintan	Prop.	Kepulauan Riau
149. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Karimun	Prop.	Kepulauan Riau
150. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Natuna	Prop.	Kepulauan Riau
151. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Lingga	Prop.	Kepulauan Riau
152. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Kepulauan Anambas	Prop.	Kepulauan Riau
153. Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Tanjung Pinang	Prop.	Kepulauan Riau
154. Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Batam	Prop.	Kepulauan Riau
155. Kepala Dinas Perhubungan	Prop.	Banten		
156. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Pandeglang	Prop.	Banten
157. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Lebak	Prop.	Banten
158. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Tangerang	Prop.	Banten
159. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Serang	Prop.	Banten
160. Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Tangerang	Prop.	Banten
161. Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Cilegon	Prop.	Banten
162. Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Serang	Prop.	Banten
163. Kepala Dinas Perhubungan	Prop.	Jawa Barat		
164. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Bogor	Prop.	Jawa Barat
165. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Sukabumi	Prop.	Jawa Barat
166. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Cianjur	Prop.	Jawa Barat
167. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Bandung	Prop.	Jawa Barat
168. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Garut	Prop.	Jawa Barat
169. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Tasikmalaya	Prop.	Jawa Barat
170. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Ciamis	Prop.	Jawa Barat
171. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Kuningan	Prop.	Jawa Barat
172. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Cirebon	Prop.	Jawa Barat
173. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Majalengka	Prop.	Jawa Barat
174. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Sumedang	Prop.	Jawa Barat
175. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Indramayu	Prop.	Jawa Barat
176. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Subang	Prop.	Jawa Barat
177. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Purwakarta	Prop.	Jawa Barat
178. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Karawang	Prop.	Jawa Barat
179. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Bekasi	Prop.	Jawa Barat
180. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Bandung Barat	Prop.	Jawa Barat
181. Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Bogor	Prop.	Jawa Barat
182. Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Sukabumi	Prop.	Jawa Barat
183. Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Bandung	Prop.	Jawa Barat
184. Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Cirebon	Prop.	Jawa Barat
185. Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Bekasi	Prop.	Jawa Barat
186. Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Depok	Prop.	Jawa Barat
187. Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Cimahi	Prop.	Jawa Barat
188. Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Tasikmalaya	Prop.	Jawa Barat
189. Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Banjar	Prop.	Jawa Barat
190. Kepala Dinas Perhubungan	Prop.	D.K.I. Jakarta		
191. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Adm. Kepulauan Seribu	Prop.	D.K.I. Jakarta
192. Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Adm. Jakarta Pusat	Prop.	D.K.I. Jakarta
193. Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Adm. Jakarta Utara	Prop.	D.K.I. Jakarta
194. Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Adm. Jakarta Barat	Prop.	D.K.I. Jakarta
195. Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Adm. Jakarta Selatan	Prop.	D.K.I. Jakarta
196. Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Adm. Jakarta Timur	Prop.	D.K.I. Jakarta

197.	Kepala Dinas Perhubungan	Prop.	Jawa Tengah		
198.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Cilacap	Prop.	Jawa Tengah
199.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Banyumas	Prop.	Jawa Tengah
200.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Purbalingga	Prop.	Jawa Tengah
201.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Banjarnegara	Prop.	Jawa Tengah
202.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Kebumen	Prop.	Jawa Tengah
203.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Purworejo	Prop.	Jawa Tengah
204.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Wonosobo	Prop.	Jawa Tengah
205.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Magelang	Prop.	Jawa Tengah
206.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Boyolali	Prop.	Jawa Tengah
207.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Klaten	Prop.	Jawa Tengah
208.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Sukoharjo	Prop.	Jawa Tengah
209.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Wonogiri	Prop.	Jawa Tengah
210.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Karanganyar	Prop.	Jawa Tengah
211.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Sragen	Prop.	Jawa Tengah
212.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Grobogan	Prop.	Jawa Tengah
213.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Blora	Prop.	Jawa Tengah
214.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Rembang	Prop.	Jawa Tengah
215.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Pati	Prop.	Jawa Tengah
216.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Kudus	Prop.	Jawa Tengah
217.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Jepara	Prop.	Jawa Tengah
218.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Demak	Prop.	Jawa Tengah
219.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Semarang	Prop.	Jawa Tengah
220.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Temanggung	Prop.	Jawa Tengah
221.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Kendal	Prop.	Jawa Tengah
222.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Batang	Prop.	Jawa Tengah
223.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Pekalongan	Prop.	Jawa Tengah
224.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Pemalang	Prop.	Jawa Tengah
225.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Tegal	Prop.	Jawa Tengah
226.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Brebes	Prop.	Jawa Tengah
227.	Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Magelang	Prop.	Jawa Tengah
228.	Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Surakarta	Prop.	Jawa Tengah
229.	Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Salatiga	Prop.	Jawa Tengah
230.	Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Semarang	Prop.	Jawa Tengah
231.	Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Pekalongan	Prop.	Jawa Tengah
232.	Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Tegal	Prop.	Jawa Tengah
233.	Kepala Dinas Perhubungan	Prop.	Jawa Timur		
234.	Kepala Dinas LLAJ	Prop.	Jawa Timur		
235.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Pacitan	Prop.	Jawa Timur
236.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Ponorogo	Prop.	Jawa Timur
237.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Trenggalek	Prop.	Jawa Timur
238.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Tulungagung	Prop.	Jawa Timur
239.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Blitar	Prop.	Jawa Timur
240.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Kediri	Prop.	Jawa Timur
241.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Malang	Prop.	Jawa Timur
242.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Lumajang	Prop.	Jawa Timur
243.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Jember	Prop.	Jawa Timur
244.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Banyuwangi	Prop.	Jawa Timur
245.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Bondowoso	Prop.	Jawa Timur
246.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Situbondo	Prop.	Jawa Timur
247.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Probolinggo	Prop.	Jawa Timur
248.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Pasuruan	Prop.	Jawa Timur
249.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Sidoarjo	Prop.	Jawa Timur
250.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Mojokerto	Prop.	Jawa Timur
251.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Jombang	Prop.	Jawa Timur
252.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Nganjuk	Prop.	Jawa Timur
253.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Madiun	Prop.	Jawa Timur
254.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Magetan	Prop.	Jawa Timur
255.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Ngawi	Prop.	Jawa Timur
256.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Bojonegoro	Prop.	Jawa Timur
257.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Tuban	Prop.	Jawa Timur
258.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Lamongan	Prop.	Jawa Timur
259.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Gresik	Prop.	Jawa Timur
260.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Bangkalan	Prop.	Jawa Timur
261.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Sampang	Prop.	Jawa Timur
262.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Pamekasan	Prop.	Jawa Timur
263.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Sumenep	Prop.	Jawa Timur
264.	Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Kediri	Prop.	Jawa Timur
265.	Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Blitar	Prop.	Jawa Timur
266.	Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Malang	Prop.	Jawa Timur
267.	Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Probolinggo	Prop.	Jawa Timur
268.	Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Pasuruan	Prop.	Jawa Timur

269. Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Mojokerto	Prop.	Jawa Timur
270. Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Madiun	Prop.	Jawa Timur
271. Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Surabaya	Prop.	Jawa Timur
272. Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Batu	Prop.	Jawa Timur
273. Kepala Dinas Perhubungan	Prop.	D. I. Yogyakarta		
274. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Kulon Progo	Prop.	D. I. Yogyakarta
275. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Bantul	Prop.	D. I. Yogyakarta
276. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Gunung Kidul	Prop.	D. I. Yogyakarta
277. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Sleman	Prop.	D. I. Yogyakarta
278. Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Yogyakarta	Prop.	D. I. Yogyakarta
279. Kepala Dinas Perhubungan	Prop.	Bali		
280. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Jembrana	Prop.	Bali
281. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Tabanan	Prop.	Bali
282. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Badung	Prop.	Bali
283. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Gianyar	Prop.	Bali
284. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Klungkung	Prop.	Bali
285. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Bangli	Prop.	Bali
286. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Karangasem	Prop.	Bali
287. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Buleleng	Prop.	Bali
288. Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Denpasar	Prop.	Bali
289. Kepala Dinas Perhubungan	Prop.	Nusa Tenggara Barat		
290. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Lombok Barat	Prop.	Nusa Tenggara Barat
291. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Lombok Tengah	Prop.	Nusa Tenggara Barat
292. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Lombok Timur	Prop.	Nusa Tenggara Barat
293. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Sumbawa	Prop.	Nusa Tenggara Barat
294. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Dompu	Prop.	Nusa Tenggara Barat
295. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Bima	Prop.	Nusa Tenggara Barat
296. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Sumbawa Barat	Prop.	Nusa Tenggara Barat
297. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Lombok Utara	Prop.	Nusa Tenggara Barat
298. Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Mataram	Prop.	Nusa Tenggara Barat
299. Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Bima	Prop.	Nusa Tenggara Barat
300. Kepala Dinas Perhubungan	Prop.	Nusa Tenggara Timur		
301. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Kupang	Prop.	Nusa Tenggara Timur
302. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Timor Tengah Selatan	Prop.	Nusa Tenggara Timur
303. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Timor Tengah Utara	Prop.	Nusa Tenggara Timur
304. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Belu	Prop.	Nusa Tenggara Timur
305. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Alor	Prop.	Nusa Tenggara Timur
306. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Flores Timur	Prop.	Nusa Tenggara Timur
307. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Sikka	Prop.	Nusa Tenggara Timur
308. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Ende	Prop.	Nusa Tenggara Timur
309. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Ngada	Prop.	Nusa Tenggara Timur
310. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Manggarai	Prop.	Nusa Tenggara Timur
311. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Sumba Timur	Prop.	Nusa Tenggara Timur
312. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Sumba Barat	Prop.	Nusa Tenggara Timur
313. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Lembata	Prop.	Nusa Tenggara Timur
314. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Rote Ndao	Prop.	Nusa Tenggara Timur
315. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Manggarai Barat	Prop.	Nusa Tenggara Timur
316. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Nagekeo	Prop.	Nusa Tenggara Timur
317. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Sumba Tengah	Prop.	Nusa Tenggara Timur
318. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Sumba Barat Daya	Prop.	Nusa Tenggara Timur
319. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Manggarai Timur	Prop.	Nusa Tenggara Timur
320. Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Kupang	Prop.	Nusa Tenggara Timur
321. Kepala Dinas Perhubungan	Prop.	Kalimantan Barat		
322. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Sambas	Prop.	Kalimantan Barat
323. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Pontianak	Prop.	Kalimantan Barat
324. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Sanggau	Prop.	Kalimantan Barat
325. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Ketapang	Prop.	Kalimantan Barat
326. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Sintang	Prop.	Kalimantan Barat
327. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Kapuas Hulu	Prop.	Kalimantan Barat
328. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Bengkayang	Prop.	Kalimantan Barat
329. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Landak	Prop.	Kalimantan Barat
330. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Melawi	Prop.	Kalimantan Barat
331. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Sekadau	Prop.	Kalimantan Barat
332. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Kayong Utara	Prop.	Kalimantan Barat
333. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Kubu Raya	Prop.	Kalimantan Barat
334. Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Pontianak	Prop.	Kalimantan Barat
335. Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Singkawang	Prop.	Kalimantan Barat

336. Kepala Dinas Perhubungan	Prop.	Kalimantan Selatan		
337. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Tanah Laut	Prop.	Kalimantan Selatan
338. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Kotabaru	Prop.	Kalimantan Selatan
339. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Banjjar	Prop.	Kalimantan Selatan
340. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Barito Kuala	Prop.	Kalimantan Selatan
341. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Tapin	Prop.	Kalimantan Selatan
342. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Hulu Sungai Selatan	Prop.	Kalimantan Selatan
343. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Hulu Sungai Tengah	Prop.	Kalimantan Selatan
344. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Hulu Sungai Utara	Prop.	Kalimantan Selatan
345. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Tabalong	Prop.	Kalimantan Selatan
346. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Tanah Bumbu	Prop.	Kalimantan Selatan
347. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Balangan	Prop.	Kalimantan Selatan
348. Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Banjarmasin	Prop.	Kalimantan Selatan
349. Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Banjarbaru	Prop.	Kalimantan Selatan
350. Kepala Dinas Perhubungan	Prop.	Kalimantan Tengah		
351. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Kotawaringin Barat	Prop.	Kalimantan Tengah
352. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Kotawaringin Timur	Prop.	Kalimantan Tengah
353. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Kapuas	Prop.	Kalimantan Tengah
354. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Barito Selatan	Prop.	Kalimantan Tengah
355. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Barito Utara	Prop.	Kalimantan Tengah
356. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Katingan	Prop.	Kalimantan Tengah
357. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Seruyan	Prop.	Kalimantan Tengah
358. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Sukamara	Prop.	Kalimantan Tengah
359. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Lamandau	Prop.	Kalimantan Tengah
360. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Gunung Mas	Prop.	Kalimantan Tengah
361. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Pulang Pisau	Prop.	Kalimantan Tengah
362. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Murung Raya	Prop.	Kalimantan Tengah
363. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Barito Timur	Prop.	Kalimantan Tengah
364. Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Palangka Raya	Prop.	Kalimantan Tengah
365. Kepala Dinas Perhubungan	Prop.	Kalimantan Timur		
366. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Paser	Prop.	Kalimantan Timur
367. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Kutai Kartanegara	Prop.	Kalimantan Timur
368. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Berau	Prop.	Kalimantan Timur
369. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Bulungan	Prop.	Kalimantan Timur
370. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Nunukan	Prop.	Kalimantan Timur
371. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Malinau	Prop.	Kalimantan Timur
372. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Kutai Barat	Prop.	Kalimantan Timur
373. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Kutai Timur	Prop.	Kalimantan Timur
374. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Penajam Paser Utara	Prop.	Kalimantan Timur
375. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Tana Tidung	Prop.	Kalimantan Timur
376. Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Balikpapan	Prop.	Kalimantan Timur
377. Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Samarinda	Prop.	Kalimantan Timur
378. Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Tarakan	Prop.	Kalimantan Timur
379. Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Bontang	Prop.	Kalimantan Timur
380. Kepala Dinas Perhubungan	Prop.	Gorontalo		
381. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Gorontalo	Prop.	Gorontalo
382. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Boalemo	Prop.	Gorontalo
383. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Bone Bolango	Prop.	Gorontalo
384. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Pohuwato	Prop.	Gorontalo
385. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Gorontalo Utara	Prop.	Gorontalo
386. Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Gorontalo	Prop.	Gorontalo
387. Kepala Dinas Perhubungan	Prop.	Sulawesi Selatan		
388. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Selayar	Prop.	Sulawesi Selatan
389. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Bulukumba	Prop.	Sulawesi Selatan
390. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Bantaeng	Prop.	Sulawesi Selatan
391. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Jeneponto	Prop.	Sulawesi Selatan
392. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Takalar	Prop.	Sulawesi Selatan
393. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Gowa	Prop.	Sulawesi Selatan
394. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Sinjai	Prop.	Sulawesi Selatan
395. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Bone	Prop.	Sulawesi Selatan
396. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Maros	Prop.	Sulawesi Selatan
397. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Pangkajene dan Kepulauan	Prop.	Sulawesi Selatan
398. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Barru	Prop.	Sulawesi Selatan
399. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Soppeng	Prop.	Sulawesi Selatan
400. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Wajo	Prop.	Sulawesi Selatan
401. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Sidenreng Rappang	Prop.	Sulawesi Selatan
402. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Pinrang	Prop.	Sulawesi Selatan
403. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Enrekang	Prop.	Sulawesi Selatan
404. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Luwu	Prop.	Sulawesi Selatan
405. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Tana Toraja	Prop.	Sulawesi Selatan

406. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Luwu Utara	Prop.	Sulawesi Selatan
407. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Luwu Timur	Prop.	Sulawesi Selatan
408. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Toraja Utara	Prop.	Sulawesi Selatan
409. Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Makassar	Prop.	Sulawesi Selatan
410. Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Pare-Pare	Prop.	Sulawesi Selatan
411. Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Palopo	Prop.	Sulawesi Selatan
412. Kepala Dinas Perhubungan	Prop.	Sulawesi Tenggara		
413. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Kolaka	Prop.	Sulawesi Tenggara
414. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Konawe	Prop.	Sulawesi Tenggara
415. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Muna	Prop.	Sulawesi Tenggara
416. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Buton	Prop.	Sulawesi Tenggara
417. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Konawe Selatan	Prop.	Sulawesi Tenggara
418. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Bombana	Prop.	Sulawesi Tenggara
419. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Wakatobi	Prop.	Sulawesi Tenggara
420. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Kolaka Utara	Prop.	Sulawesi Tenggara
421. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Konawe Utara	Prop.	Sulawesi Tenggara
422. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Buton Utara	Prop.	Sulawesi Tenggara
423. Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Kendari	Prop.	Sulawesi Tenggara
424. Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Bau-Bau	Prop.	Sulawesi Tenggara
425. Kepala Dinas Perhubungan	Prop.	Sulawesi Tengah		
426. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Banggai	Prop.	Sulawesi Tengah
427. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Poso	Prop.	Sulawesi Tengah
428. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Donggala	Prop.	Sulawesi Tengah
429. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Toli-Toli	Prop.	Sulawesi Tengah
430. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Buol	Prop.	Sulawesi Tengah
431. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Morowali	Prop.	Sulawesi Tengah
432. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Banggai Kepulauan	Prop.	Sulawesi Tengah
433. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Parigi Moutong	Prop.	Sulawesi Tengah
434. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Tojo Una-Una	Prop.	Sulawesi Tengah
435. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Sigi	Prop.	Sulawesi Tengah
436. Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Palu	Prop.	Sulawesi Tengah
437. Kepala Dinas Perhubungan	Prop.	Sulawesi Utara		
438. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Bolaang Mongondow	Prop.	Sulawesi Utara
439. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Bolaang Mongondow Timur	Prop.	Sulawesi Utara
440. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Bolaang Mongondow Selatan	Prop.	Sulawesi Utara
441. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Minahasa	Prop.	Sulawesi Utara
442. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Kepulauan Sangihe	Prop.	Sulawesi Utara
443. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Kepulauan Talaud	Prop.	Sulawesi Utara
444. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Minahasa Selatan	Prop.	Sulawesi Utara
445. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Minahasa Utara	Prop.	Sulawesi Utara
446. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Minahasa Tenggara	Prop.	Sulawesi Utara
447. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Bolaang Mongondow Utara	Prop.	Sulawesi Utara
448. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	Prop.	Sulawesi Utara
449. Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Manado	Prop.	Sulawesi Utara
450. Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Bitung	Prop.	Sulawesi Utara
451. Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Tomohon	Prop.	Sulawesi Utara
452. Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Kotamobagu	Prop.	Sulawesi Utara
453. Kepala Dinas Perhubungan	Prop.	Sulawesi Barat		
454. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Mamuju Utara	Prop.	Sulawesi Barat
455. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Mamuju	Prop.	Sulawesi Barat
456. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Mamasa	Prop.	Sulawesi Barat
457. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Polewali Mandar	Prop.	Sulawesi Barat
458. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Majene	Prop.	Sulawesi Barat
459. Kepala Dinas Perhubungan	Prop.	Maluku		
460. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Maluku Barat Daya	Prop.	Maluku
461. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Maluku Tengah	Prop.	Maluku
462. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Maluku Tenggara	Prop.	Maluku
463. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Maluku Tenggara Barat	Prop.	Maluku
464. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Buru	Prop.	Maluku
465. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Buru Selatan	Prop.	Maluku
466. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Seram Bagian Timur	Prop.	Maluku
467. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Seram Bagian Barat	Prop.	Maluku
468. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Kepulauan Aru	Prop.	Maluku
469. Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Ambon	Prop.	Maluku
470. Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Tual	Prop.	Maluku
471. Kepala Dinas Perhubungan	Prop.	Maluku Utara		
472. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Halmahera Barat	Prop.	Maluku Utara
473. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Halmahera Tengah	Prop.	Maluku Utara

474. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Halmahera Utara	Prop.	Maluku Utara
475. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Halmahera Selatan	Prop.	Maluku Utara
476. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Kepulauan Sula	Prop.	Maluku Utara
477. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Halmahera Timur	Prop.	Maluku Utara
478. Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Ternate	Prop.	Maluku Utara
479. Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Tidore Kepulauan	Prop.	Maluku Utara
480. Kepala Dinas Perhubungan	Prop.	Papua		
481. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Merauke	Prop.	Papua
482. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Jayawijaya	Prop.	Papua
483. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Jayapura	Prop.	Papua
484. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Nabire	Prop.	Papua
485. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Kepulauan Yapen	Prop.	Papua
486. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Biak Numfor	Prop.	Papua
487. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Puncak Jaya	Prop.	Papua
488. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Paniai	Prop.	Papua
489. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Mimika	Prop.	Papua
490. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Sarmi	Prop.	Papua
491. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Keerom	Prop.	Papua
492. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Pegunungan Bintang	Prop.	Papua
493. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Yahukimo	Prop.	Papua
494. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Tolikara	Prop.	Papua
495. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Waropen	Prop.	Papua
496. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Boven Digoel	Prop.	Papua
497. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Mappi	Prop.	Papua
498. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Asmat	Prop.	Papua
499. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Supiori	Prop.	Papua
500. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Mamberamo Raya	Prop.	Papua
501. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Mamberamo Tengah	Prop.	Papua
502. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Yalimo	Prop.	Papua
503. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Lanny Jaya	Prop.	Papua
504. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Nduga	Prop.	Papua
505. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Puncak	Prop.	Papua
506. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Dogiyai	Prop.	Papua
507. Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Jayapura	Prop.	Papua
508. Kepala Dinas Perhubungan	Prop.	Papua Barat		
509. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Sorong	Prop.	Papua Barat
510. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Manokwari	Prop.	Papua Barat
511. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Fakfak	Prop.	Papua Barat
512. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Sorong Selatan	Prop.	Papua Barat
513. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Raja Ampat	Prop.	Papua Barat
514. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Teluk Bintuni	Prop.	Papua Barat
515. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Teluk Wondama	Prop.	Papua Barat
516. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Kaimana	Prop.	Papua Barat
517. Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Sorong	Prop.	Papua Barat
518. Kepala Pel. Penyeb. Gorontalo				
519. Kepala Pel. Penyeb. Kalabahi				
520. Kepala Pel. Penyeb. Kariangu				
521. Kepala Pel. Penyeb. Palembang				
522. PT. ASDP Dir. Usaha				
523. PT. ASDP Cab. Bakauheni				
524. PT. ASDP Cab. Ketapang				
525. PT. ASDP Cab. Lembar				
526. PT. ASDP Cab. Kayangan				
527. PT. ASDP Cab. Balikpapan				
528. PT. ASDP Cab. Bajoe				
529. PT. ASDP Cab. Kupang				
530. PT. ASDP Cab. Palembang				
531. PT. ASDP Cab. Luwuk				
532. Ka. Balai ASDP Palembang				
533. PT. ASDP Cab. Merak				
534. PT. ASDP Cab. Surabaya				
535. Kepala Pusat Kajian Strategis, Setjen Dephub				
536. Ketua Sekolah Tinggi Transportasi Darat				
537. Kepala Puslitbang Bidang Perhubungan Darat				
538. Kepala Pusdiklat Perhubungan Darat				
539. Kepala Balai PLJSKB Bekasi				
540. Kepala Balai Diklat Transjaya Tegal				
541. Kepala Balai Diklat Transportasi Darat Bali				

